

Pengembangan Kurikulum PAI dalam Telaah Filsafat Pendidikan Islam

Nor Salam

Dosen STAI Al-Yasini

Abstrak:

tidak diragukan lagi bahwa maju mundurnya kejayaan sebuah bangsa ditentukan –salah satunya –oleh kualitas pendidikan yang diperolehnya, namun demikian, penting juga ditegaskan bahwa kualitas sebuah pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek kurikulum yang digunakannya. Di sinilah pentingnya kajian seputar pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang kemudian penulis bingkai ke dalam sebuah tema kajian “Pengembangan Kurikulum PAI dalam Telaah Filsafat Pendidikan Islam. Dari kajian sederhana ini, kesimpulan yang dapat diungkap kaitannya dengan agenda pengembangan kurikulum PAI meliputi, pertama, pada aspek tujuan pendidikan; kedua, aspek tenaga pendidik; ketiga, konten pendidikan Islam itu sendiri; keempat, kurikulum PAI harus mampu beradaptasi dengan kemajuan sains dan teknologi.

Kata Kunci: *Kurikulum PAI, Filsafat Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Sebuah hal yang lazim untuk dikatakan bahwa, pendidikan merupakan sarana pencerahan bangsa serta berperan dalam menciptakan kemajuan suatu bangsa. Maju tidaknya sebuah negara, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pendidikan masyarakatnya. Semakin baik kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal pendidikan, maka akan melahirkan *man power* yang berkualitas pula. Sebaliknya, kurang berkualitasnya SDM sebuah bangsa di bidang pendidikan, akan menjadi penghambat kemajuan negara tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, Fantini (1986) mengemukakan bahwa untuk menilai kualitas pendidikan, paling tidak ada empat dimensi yang harus diperhatikan: aspek individu murid, kurikulum, guru dan lulusan dari suatu proses pendidikan (Fantini, 1986: 44).

Pada aspek lulusan dari suatu proses pendidikan, maka posisi pendidikan Islam di Indonesia sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional yang mencita-citakan pada terbentuknya insan kamil atau muslim paripurna, secara implisit akan mencerminkan pula terhadap ciri-ciri

kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Namun, dalam kenyataannya pendidikan Islam yang diharapkan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan.

Secara lebih spesifik, pendidikan Islam yang memiliki tugas mewariskan budaya Islam, mengembangkan potensi anak didiknya sekaligus juga berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*), semakin mendapat tantangan luar biasa seiring kemajuan dan perkembangan jaman. Era globalisasi yang terjadi dewasa ini menuntut pendidikan Islam bergerak secara lebih *active* dalam penginternalisasian nilai-nilai pendidikan Islam itu sendiri menuju pada tujuan pendidikan yang diinginkan.

Salah satu aspek di dalam pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut, ialah aspek kurikulum yang digunakan. Di dalam makalah ini, penulis mencoba untuk mengulas tema tersebut sebagai sebuah kajian pengantar. Tentu, makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya, masukan serta saran penulis harapkan demi karya tulis yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Sekilas tentang Terminologi dan Konsep Kurikulum

Sebelum memasuki konsep ideal kurikulum dalam pandangan Islam, makna definitif dari kurikulum secara *general* perlu untuk diketahui terlebih dahulu. Banyak pakar pendidikan yang telah menuangkan idenya terkait pengertian terminologis dari kurikulum.

Majid (2012) mengatakan bahwa dalam bahasa Arab, kata kurikulum disebut dengan *manhaj* yang bermakna jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan, sedangkan Muhaimin (2009) mengutip pendapat Al-Khauy (1981) yang memaknai *al-manhaj* sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan (Muhaimin, 2009: 1).

Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan (Sukmadinata, 1988: 4). Dalam cakupan global, Zais mengartikan kurikulum sebagai “*..Curriculum is a racecourse of subject matters to be mastered*” (Zais, 1976: 7). Sedangkan dalam pengertian secara lebih spesifik, Zais mengutip beberapa pendapat, misalnya “*Curriculum as all the means employed by the school to provide students with opportunities for desirable learning experiences*” (Krug, 1956: 4); atau pendapat Doll yang mengatakan bahwa:

“The commonly-accepted definition of the curriculum has changed from content of courses of study and lists of subjects and course to all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school” (Doll, 1964: 15 dalam Zais, 1976: 8).

Nampaknya, secara konseptual, pendapat Doll tersebut menjadi salah satu rujukan populer dalam mendefinisikan arti kurikulum. Setidaknya hal tersebut terlihat dari apa yang dikutip Rosyada dalam bukunya. Mari kita simak kutipan berikut:

“...Kurikulum sudah tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan yang akan dipelajari serta urutan pelajaran yang akan dipelajari siswa, tetapi seluruh pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah (Doll, 1964: 15),...” (Rosyada, 2007: 26).

Di Indonesia, landasan yuridis terkait pengertian kurikulum terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjelaskan bahwa:

“Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (Kemendikbud, 2013: 8)

Athiyah Al-Abrasyi, dalam salah satu buku beliau, menjadikan sejarah sebagai salah satu tolok ukur dalam menilai arti kurikulum. Mulai dari tokoh Umar bin Khatthab yang mengisyaratkan kurikulum melalui beberapa tahap, diantaranya: mengetahui prinsip-prinsip Islam, menghafal al-Qur’an, mempelajari hadits, berenang, berkuda, memanah, serta mengetahui pepatah-pepatah Arab. Hal tersebut, masih menurut Al-Abrasyi, dapat diketahui dari berita yang disampaikan oleh Khalifah Umar kepada para pengusaha Islam kala itu (Al-Abrasyi, 1970: 163). Mgasih menurut Al-Abrasyi, penekanan kurikulum dalam hal mempelajari al-Qur’an sebagai dasar, juga disampaikan oleh Ibnu Sina dalam kitab “As-Siyasah”, disamping ada pula membaca, menulis, dan juga syair. Tokoh lainnya yang menjadi rujukan Al-Abrasyi ialah Ibnu Maskawaih, Ibnu Tawam, maupun Al-Ghazali.

Satu hal menarik yang dapat disimpulkan dari pendapat Al-Abrasyi di atas ialah,

korelasi antara kurikulum dalam aspek definitif di masa lampau, dengan implementasi kurikulum pada dunia modern saat ini. Sebagai contoh misalnya, pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Al-Abrasyi mengatakan bahwa sesudah mempelajari al-Qur'an, barulah seorang anak diarahkan dan diberi petunjuk pada ilmu yang sesuai dengan bakat dan kesediaannya. Dalam konteks kekinian, penentuan jurusan sesuai dengan bakat dan minat anak juga menjadi perhatian para ahli pendidikan modern. Hal serupa juga terjadi dalam pendidikan model pondok pesantren. Al-Abrasyi mengatakan bahwa pada era Ibnu Tawam, aspek menghafal al-Qur'an mendapat porsi utama dalam kurikulum. Pendidikan model pondok pesantren salaf pun menekankan hal yang sama.

Dari sejarah para tokoh Islam yang berbicara tentang kurikulum tersebut, berikutnya Al-Abrasyi menyimpulkan pembagian kurikulum dalam pendidikan Islam ke dalam dua tingkatan. *Pertama*, kurikulum tingkat pertama/permulaan yang mengandung beberapa rencana pelajaran, antara lain: (i) Mengarah pada bidang keagamaan, seperti belajar sendi-sendi bacaan, menulis, menghafal al-Qur'an dan mengenal sendi-sendi agama Islam, (ii) Memberikan perhatian yang lebih terhadap pendidikan akhlak dan moral, (iii) Menyertakan segi-segi praktis lainnya seperti bahasa, berhitung dan olahraga, serta (iv) Menjauhkan pelajaran tentang keindahan kesenian lewat gambar, tari dan sajak romantis. *Kedua*, kurikulum pendidikan tinggi Islam yang terdiri dari: (i) Mendahulukan studi keagamaan sebelum subyek-subyek pembelajaran lainnya, (ii) Memberikan keserasian antara ilmu agama dengan ilmu eksakta, (iii) Pelajaran sastra, ilmu keagamaan dan kemanusiaan mendapat porsi yang lebih dibanding ilmu eksakta, serta (iv) Kurikulum lebih bersifat penggalan terhadap ilmu eksakta dan yang bersifat humanitas (Al-Abrasyi, 1970: 165-173).

Poin penting yang dapat ditarik dari pendapat Al-Abrasyi tersebut salah satunya terletak pada penekanan aspek moralitas yang ada di dalam kurikulum pendidikan Islam pada era tersebut.

Jika Al-Abrasyi memandang kurikulum berdasarkan kajian sejarah masa lampau, maka lain halnya dengan Zainal Arifin (2012). Ia memandang kurikulum dalam pengertian yang lebih modern. Menurutnya, pengertian kurikulum secara modern adalah "Semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi/materi) yang telah tersusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan" (Zainal Arifin, 2012: 4).

Pemaknaan terminologis kurikulum yang mengacu pada dua sisi berbeda, yaitu pandangan lama/tradisional dan pandangan baru/modern, juga diamini oleh Hamalik. Dalam karyanya, Hamalik memberikan definisi kurikulum berdasarkan dua pandangan berbeda tersebut. Menurutnya, secara tradisional kurikulum memiliki arti "sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah". Sedangkan dari sisi pandangan modern, Hamalik mengutip pendapat Romine (1954) yang merumuskan "*Curriculum is interpreted to mean all of the organized, courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not*" (Hamalik, 2009: 3-4).

Sepintas, pemaknaan kurikulum yang mengacu pada segi "kurun waktu", seperti yang dijelaskan oleh beberapa pendapat di atas memunculkan adanya perbedaan cakupan (*scope*), baik dalam aspek isi maupun tujuan kurikulum. Kurikulum dalam pandangan lama memiliki cakupan yang lebih sempit daripada pengertian kurikulum dalam pandangan modern. Era tradisional memaknai isi kurikulum sebatas pada mata pelajaran yang disampaikan di dalam kelas dengan tujuan hanya untuk memperoleh ijazah. Dari segi *content* pun, kurikulum

lebih menekankan pada “isi” berupa mata pelajaran saja. Sedangkan pandangan modern tidak demikian. Kurikulum berisi tidak hanya sebatas mata pelajaran-mata pelajaran semata, tetapi juga mencakup seluruh kegiatan dan pengalaman (*all of the organized courses, activities, and experiences*) dari para peserta didik. Tujuannya pun tidak hanya untuk mendapatkan ijazah, namun juga menjadikan peserta didik untuk dapat belajar cara hidup di dalam masyarakat, yang tentu saja hal tersebut bertumpu pada potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Secara lebih sistematis, pembicaraan kurikulum, tidak dapat terlepas dari pembahasan terkait konsep-konsep yang ada di dalamnya. Beberapa konsep yang terdapat di dalam kurikulum diantaranya ialah: *Pertama*, Kurikulum ideal (*Ideal curriculum*), yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang baik, yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam buku pegangan kurikulum. *Kedua*, Kurikulum nyata (*Real curriculum*), yaitu keadaan nyata/sebenarnya dari kurikulum yang direncanakan, sebagaimana terdapat dalam buku pegangan kurikulum. *Ketiga*, Kurikulum tersembunyi (*Hidden curriculum*), yaitu segala sesuatu yang memengaruhi peserta didik secara positif ketika sedang mempelajari sesuatu. *Keempat*, Kurikulum dan pembelajaran (*Curriculum and instruction*). Kurikulum menunjuk pada suatu program yang bersifat umum, untuk jangka lama dan tidak dapat dicapai dalam waktu seketika. Sedangkan pembelajaran adalah implementasi kurikulum secara nyata dan bertahap yang menuntut peran aktif peserta didik (Zainal Arifin, 2012: 7).

Terkait dengan istilah *hidden curriculum* dalam penjelasan di atas, Zaid (1976) mengartikannya sebagai “*those aspects of the curriculum that are unplanned or unintended, and therefore overlooked*” (Zaid, 1976: 8). Artinya, kurikulum tersembunyi sebagai sebuah kurikulum yang “tak terencana”, “tak terduga”, dan oleh

karenanya menjadi hal yang terabaikan. Lain halnya dengan Glatthorn (1987), sebagaimana dikutip oleh Rosyada (2007), yang memandang kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) sebagai sebuah kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari, namun memberikan perubahan nilai, persepsi dan perilaku siswa (Rosyada, 2007: 28).

Dari beberapa konsep kurikulum di atas, nampaknya ada satu konsep yang belum disinggung, yaitu *The Living Curriculum* (Kurikulum yang hidup dan menghidupkan). Penyandang kurikulum ini tak lain adalah guru. Guru merupakan gambaran kurikulum dalam tataran nyata, karena di tangan guru lah sebuah kurikulum yang awalnya bersifat konseptual dapat menjadi realita dengan diimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran.

Mencari Rumusan Kurikulum Ideal dalam Ragam Perspektif

Dari pembahasan mengenai pengertian serta beberapa konsep kurikulum di atas, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana konsep kurikulum yang ideal?. Pertanyaan ini tentu saja akan memunculkan beragam versi jawaban, tergantung pada pendekatan serta perspektif yang dipergunakan.

Dalam menentukan nilai ideal sebuah kurikulum, salah satu hal mendasar yang perlu direnungkan secara mendalam terlebih dahulu ialah pada aspek tujuan pendidikan yang ingin dicapai, jika menggunakan pendekatan kurikulum tertentu. Disinilah filsafat pendidikan berperan. Sebagai sebuah acuan, pemikiran filsafat di bidang pendidikan akan mampu menjadi “kompas” terhadap arah tujuan pendidikan yang diinginkan. Istilah lain dengan meminjam pendapat Zais (1976) yang mengatakan bahwa “*..common faith or “philosophy” which serves its members as a guide for living the good life*” (Zais, 1976: 105). Melalui perenungan mendalam tersebut, akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan sebuah jawaban berkenaan dengan pendidikan. Dari sini sebenarnya

dapat kita tarik sebuah kesamaan antara filsafat dan kurikulum, dimana keduanya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan berupa masalah yang memerlukan jawaban serta solusi lebih lanjut. Zais (1976) menjelaskan hal tersebut dengan mengutip pendapat Morris (1961) yang mengatakan bahwa antara filsafat dan kurikulum sebenarnya mengacu pada pertanyaan umum yang sama, yakni dapat menjadi apa manusia itu (*what can man become*)?. Senada dengan hal tersebut, Wiles (1989) seperti dikutip Rosyada (2007) mengajukan tiga pertanyaan utama dalam filsafat pendidikan, yakni “*What is good?*”, “*What is true*” dan “*What is real*” (Rosyada, 2007: 36). Hanya saja, perbedaan diantara keduanya ialah filsafat meletakkannya pada lingkup manusia dalam arti luas (*in macrocosm- ‘Man’*), sedangkan kurikulum melihat dalam perspektif yang lebih kecil (*in microcosm- ‘Men’*) (Zais, 1976: 106).

Kembali kepada pembahasan terkait pengertian kurikulum menurut pandangan lama (yang lebih menekankan pada aspek “isi” berupa mata pelajaran), maupun pandangan baru (yang menekankan pada aspek proses dengan mengacu pada potensi peserta didik), keduanya memiliki implikasi terhadap model kurikulum yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran. Secara logika, hal tersebut wajar terjadi sebab “rumusan awal” yang terbentuk melalui pendekatan filsafat, berbeda diantara keduanya. Secara otomatis, tujuan pendidikan yang diinginkan pun berbeda antara pandangan lama dengan pandangan baru tersebut.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan, khususnya pada tujuan pendidikan agama Islam, Muhammad al-Munir membaginya ke dalam tiga poin pokok. *Pertama*, tercapainya manusia seutuhnya, yakni manusia yang berakhlak mulia. Hal tersebut beliau dasarkan pada Q.S Al-Maidah [5]: 3. *Kedua*, tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, yang telah termaktub dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 201. *Ketiga*, menumbuhkan kesadaran manusia untuk mengabdikan, dan

takut kepada-Nya, sesuai dengan QS Az-Zariyat [51]: 56 (Majid, 2012: 42).

Bila menilik pada konsep kurikulum terbaru yang ada di Indonesia, yaitu Kurikulum 2013 –yang entah bagaimana “nasib” nya kini- menjelaskan bahwa kurikulum yang dipergunakan pada lembaga-lembaga pendidikan menekankan pada keseimbangan antara *hardskill* dan *softskill*, dimulai dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian (Kemendikbud, 2013: 26).

Perspektif lainnya yang dapat digunakan untuk menilai keidealan suatu kurikulum, yakni perspektif Islam. Dalam hal ini, Al-Abrasyi memiliki pendapat tentang prinsip yang seharusnya dipegang dalam menyiapkan kurikulum pendidikan Islam. *Pertama*, memasukkan pelajaran keagamaan sebagai pondasi awal pengetahuan siswa. *Kedua*, memperhatikan sekali masalah pendidikan akhlak dan fikih, termasuk di dalamnya mempelajari filsafat, karena kesemuanya itu membawa kepada tujuan-tujuan rohaniyah dan akhlak. *Ketiga*, mempelajari ilmu-ilmu praktis dan ilmu mantiq (logika). *Keempat*, menekankan pendidikan Islam pada aspek “jiwa” nya, bahwa tujuan dari mencari ilmu bukanlah untuk mencari hidup, tetapi untuk menyelami hakekat kebenaran dan mendidik akhlak dan moral. *Kelima*, pendidikan Islam tidaklah mengesampingkan pemberian tuntunan kepada para siswa untuk mempelajari subyek atau latihan-latihan kejuruan, setelah mereka selesai dari mempelajari ilmu-ilmu keagamaan. *Keenam*, bila pendidikan Islam lebih mengutamakan nilai-nilai ilmiah yang bersifat kerohanian, Islam juga tidak mengabaikan subyek-subyek kebudayaan (Al-Abrasyi, 1970: 174- 186).

Melalui ragam pendekatan di atas, pendidikan jika diibaratkan sebagai sebuah sistem, maka setidaknya terdapat empat komponen di dalamnya yang saling berkaitan satu dengan lainnya, serta saling berproses dalam menjalankan pendidikan. Keempat komponen tersebut ialah: *input*

(peserta didik), proses (melalui pembelajaran kepada peserta didik), *output* (peserta didik yang sudah lulus/mencapai gelar sarjana) dan *outcome* (capaian pembelajaran). Dalam praktiknya, keseluruhan proses tersebut tentu memerlukan dasar serta landasan dalam mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Maka disinilah filsafat pendidikan Islam berperan.

Muhaimin (2009) mengatakan bahwa dalam tingkatan filosofis, pemahaman akan hakekat pendidikan Islam dapat ditilik dari tiga aspek, yaitu pandangan mengenai realita (ontologi), pandangan mengenai pengetahuan (epistemologi), dan pandangan mengenai nilai (aksiologi), termasuk di dalamnya etika dan estetika.

Kaitannya dengan pendidikan Islam, kajian ontologi mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Islam diperlukan sebuah pendirian mengenai pandangan manusia dan kriteria masyarakat yang bagaimanakah yang diperlukan oleh pendidikan Islam.

Selanjutnya, kajian epistemologi diperlukan dalam pendidikan Islam guna mengkaji penyusunan kurikulum yang tepat yang didasari oleh hakikat pengetahuan menurut pandangan Islam. Terakhir, dalam bidang aksiologi, masalah etika yang mempelajari tentang kebaikan ditinjau dari kesusilaan, sangat dekat dengan pendidikan Islam. (Muhaimin, 2009: 65-66). Dari sini dapat disimpulkan bahwa, kajian filsafat pendidikan Islam memiliki kaitan yang erat dengan kurikulum PAI yang akan dipergunakan dalam proses belajar-mengajar.

Tantangan dan Idealitas Kurikulum PAI: sebuah Analisis Filosofis

Pada uraian sebelumnya, telah disinggung mengenai peran filsafat pendidikan Islam dalam konteks kurikulum PAI. Secara teoritis, semestinya dengan menggunakan pemikiran filsafat yang benar,

maka akan dapat menghasilkan lulusan pendidikan Islam yang berkualitas. Namun kenyataannya, apabila konsep tersebut kemudian ditarik pada kondisi pendidikan kita saat ini, dengan melihat degradasi moral melalui berbagai fakta yang ada di lingkup pendidikan kita, maka satu pertanyaan besar muncul. Dimanakah letak moral pelajar kita saat ini?. Pertanyaan mendasar itu seharusnya mampu memicu potensi kefilosofatan manusia dalam merekonstruksi pemahaman tentang arti penting kurikulum pendidikan Islam sebagai “kompas” pendidikan generasi penerus bangsa ini.

Masalah kemerosotan moral seperti disinggung di atas, bila ditilik dari segi kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia saat ini, memunculkan beberapa titik lemah. Sam M. Chan (2008) mengkritisi hal tersebut dari beberapa bidang. Menurutnya, pada tingkat pemerintah, implementasi otonomi pendidikan masih pada taraf “membuat keputusan” (*making decision*) dan belum menyentuh pada upaya optimal menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak. Ditambah lagi, arus globalisasi tanpa batas telah membuat anak dalam keadaan kritis akan nilai moral yang benar (Sam M. Chan, 2008: 26-27).

Apa yang penulis deskripsikan tersebut, hanyalah pada satu aspek saja, yakni tentang kemerosotan moral para generasi muda saat ini. Tidak dapat kita elakkan bahwa seringkali PAI menjadi “kambing hitam” atas segala problem moral yang menimpa generasi mudanya. Padahal, banyak aspek yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut.

Tantangan lain yang dialami oleh pendidikan Islam saat ini ialah pada aspek gonta-gantinya kebijakan terkait bidang pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, tentu pihak yang merasa kebingungan ialah guru. Jika guru tidak memiliki landasan pijak yang jelas dan kokoh, maka ia akan mudah terombang-ambing oleh arus transformasi dan inovasi pendidikan dan pembelajaran yang begitu

gencar terjadi di era modern seperti sekarang ini.

Di lain pihak, begitu dahsyatnya pengaruh dunia teknologi saat ini baik melalui *handphone*, internet, maupun media lainnya, menambah panjang deret tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, utamanya pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam kita saat ini, dengan jumlah pertemuan yang teramat terbatas, harus berpacu dengan bebasnya dunia “hiburan” yang melanda utamanya pada generasi muda. Maka tak heran apabila pelajaran agama Islam dewasa ini hanya dipandang sebagai sebuah pelajaran yang secara formalitas diberikan di kelas, tanpa bisa meninggalkan “bekas” pada para peserta didik kita.

Pembahasan yang telah penulis deskripsikan sejak awal mengenai kurikulum serta beberapa konsep di dalamnya –termasuk Kurikulum Pendidikan Agama Islam –akhirnya bermuara pada tahap akhir penulisan, yakni mengenai pertanyaan: “Bagaimana seharusnya kurikulum PAI yang ideal?”

Berdasarkan pada pemaparan penulis sejak awal terkait dengan terma “Fisafat Pendidikan Islam dan Implikasinya terhadap Kurikulum PAI”, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari pembahasan terkait kurikulum di atas ialah bahwa, dalam menciptakan kurikulum ideal Pendidikan Agama Islam di era global saat ini, perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya ialah:

1. Rumusan tujuan pendidikan tentu saja berkenaan dengan apa yang hendak dicapai. Dalam konteks pendidikan Islam, hal tersebut tidak bisa terlepas dengan tujuan pendidikan menurut Al-Qur’an dan Hadits. Maka konsep kurikulum PAI yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran, harus berhulu pada nilai Al-Qur’an dan Hadits, memiliki target yang jelas dan mampu menarik minat masyarakat sebagai *user* dari produk pendidikan yang dihasilkan kelak. Disini maka secara

konseptual-teoritik, masalah keimanan kepada Tuhan YME seharusnya dijadikan sebagai *core* (inti) dan sumber nilai bagi peserta didik.

2. Pendidik (guru) sebagai aktor yang berada di balik kurikulum, hendaknya tidak hanya berperan sebagai “guru” saja, tetapi sekaligus juga menjadi “orang tua” dari peserta didiknya. Hal tersebut penting untuk digarisbawahi sebab akan berimplikasi pada kualitas pembelajaran yang dilakukan. Penyampaian materi pembelajaran oleh guru yang hanya sekedar menjalankan tugas “menyampaikan informasi” saja, tentu akan jauh berbeda dengan pendidik yang mampu berperan dalam “memahamkan” peserta didik tidak hanya melalui *transfer of knowledge* semata, tetapi juga menyentuh aspek humanitas dan psikologi para peserta didiknya.
3. *Content* dari pendidikan Islam saat ini haruslah mengikuti *issue-issue* yang berkembang di masyarakat. Pendidikan Islam harus mampu berkembang sesuai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai sebuah *social demand*, keinginan serta perkembangan yang terjadi pada lingkungan masyarakat akan banyak memberikan andil dalam pemilihan model kurikulum, termasuk kurikulum pendidikan Islam.
4. Guna mengejawantahkan tujuan pendidikan Islam di tengah masyarakat yang semakin modern, maka PAI harus mampu beradaptasi serta melakukan elaborasi dengan kemajuan *science* dan *technology* yang senantiasa berkembang mengikuti kemodernan jaman. Kurikulum PAI sudah semestinya untuk senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan dan terus-menerus guna merespons perkembangan dan tuntutan jaman yang semakin modern. Sehingga pada satu titik nantinya PAI tidak lagi dipandang sebagai sebuah bidang ilmu yang statis.

Kesimpulan

Pendidikan sebagai salah satu pilar penentu kemajuan sebuah bangsa, tidak dapat dilepaskan dari aspek guru (pendidik) dan kurikulum yang digunakan. Dua aspek tersebut menjadi penting untuk diperhatikan demi tercapainya tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan. Kurikulum ibarat “kompas” yang menentukan arah pendidikan, sedangkan guru berperan sebagai “motor penggerak” kebijakan pendidikan yang tertuang melalui kurikulum yang dipergunakan.

Kaitannya dengan kurikulum, Ujung tombak dari setiap kebijakan atau yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk kurikulum yang digunakan), akhirnya berpulang pada makhluk yang bernama guru. Gurulah yang akan melaksanakan secara operasional segala bentuk pola, gerak, dan geliatnya perubahan kurikulum yang terjadi.

Sebagai “motor penggerak” dan pelaksana operasional kurikulum dalam pendidikan, guru hendaknya mampu bertindak sebagai *role mode*, suri teladan bagi kehidupan sosial akademis siswa, baik di dalam maupun di luar kelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasyi, M. Athiyah. (1970). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Arifin, Zainal (2012). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Chan, Sam M. (2008). *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hamalik, Oemar. (2009). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013*.
- Majid, Abdul (2012). *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Fantini. (1986). *Regaining Excellence in Education*. Columbus, Ohio: Merrill
- Muhaimin. (2009). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sukmadinata, Nana S. (1988). *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Departemen Pendidikan & Kebudayaan
- Rosyada, Dede. (2007). *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Zais, Robert S. (1976). *Curriculum: Principles and Foundations*. New York: Harper & Row, Publisher